

## Yana Mulyana: Fasilitas Kesehatan Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

**BANDUNG (IM)** - Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, hadirnya fasilitas kesehatan (faskes) baru bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat yang membutuhkan.

Yana Mulyana menyebut, adanya klinik baru di Kota Bandung sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan berkualitas yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mendukung akses layanan kesehatan yang berkelanjutan.

"Atas nama Pemkot Bandung saya mengapresiasi adanya tambahan fasilitas kesehatan di Kota Bandung," kata Yana Mulyana, Senin (20/3).

Yana meminta sumber daya manusia Klinik Adiandra Medika untuk memiliki sikap profesional dengan tetap mengembangkan kompetensinya dan mengutamakan pelayanan publik yang baik.

"Di sini cukup komplit (fasilitas) maka pemerintah butuh dukungan berbagai pihak tentunya," ucapnya.

Yana berharap, tentu

hadirnya faskes ini membantu memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan warga. Bahkan dapat memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih luas lagi.

"Saya harap bisa fasilitasnya bisa terlayani BPJS. Mudah-mudahan pelayanan ini berjalan lancar dan sukses," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Adiandra Medika Clinic Adyesa Kevindra Albari menyampaikan, faskes yang dikelolanya saat ini baru melayani pasien umum saja.

"Kita membangun klinik yang modern, fokus pada edukasi dan produktif. Kita berkolaborasi dengan dokter utama juga pratama. Di sini juga ada dokter umum, dokter gigi. Ada 12 ruangan untuk spesialis," kata Adyesa Kevindra.

Adiandra Medika Clinic buka hari Senin - Sabtu 08.00 - 20.00. Ada berbagai pelayanan seperti poli umum, poli gigi, instalasi farmasi, vaksinasi by imunecare, instalasi laboratorium, poli mata poli kulit dan kelamin, spesialis penyakit dalam dan spesialis gizi. ● pra

## Pedagang Pakaian Bekas Impor Gedebage Keluhkan Larangan Thrifting

**BANDUNG (IM)** - Pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di Pasar Cimol, Gedebage, Kota Bandung, mengeluhkan kebijakan pemerintah yang melarang menjual pakaian bekas impor. Larangan ini membuat penjualan barang sepi dan omzet menurun.

"Iya jelas (omzet menurun), sesudah (pandemi) corona, terus ada larangan pakaian bekas impor," ujar Rian Priatna salah seorang pedagang pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gedebage yang sudah berbisnis sejak 12 tahun terakhir, Senin (20/3).

Larangan menjual pakaian bekas impor, ia mengatakan berpengaruh terhadap aktivitas jual beli pakaian bekas impor di Gedebage. Sejak lima hari terakhir, gudang-gudang penyimpanan barang thrifting tutup.

"Jualan masih tenang hanya pembeli tidak ada. Mereka takut ditangkap dan gudang-gudang sudah tutup," katanya.

Ia mengatakan petugas dari Bea Cukai dan Polda Jawa Barat sempat melakukan pengecekan ke Pasar Cimol Gedebage Bandung. Rian melanjutkan ia bersama pedagang lain saat ini masih menjual pakaian bekas impor dengan diecer dan grosir.

"Sepi pisan. Ada pengunjung takut disita barang," katanya.

Namun, pengunjung sudah jarang dan membeli bahan sulit setelah kebijakan

larangan pakaian bekas impor dilarang. Produk yang dijualnya merupakan produk Jepang dan Korea Selatan didapat dari negara Malaysia dan Singapura.

"Kalau saya grosir, untuk dijual lagi, gegecer langkah satu atau dua. Pembeli banyak beralih di zaman corona juga (ke thrifting)," katanya.

Ia menurutkan para pedagang berharap agar terdapat kejelasan terkait kebijakan larangan menjual pakaian bekas impor. Apalagi usaha thrifting sudah menjamur di seluruh Indonesia dan sangat membantu kalangan menengah ke bawah.

"Kalau membeli produk kita (lokal), bahan dan harga beli tidak sanggup orang kita," katanya.

Rian mengatakan banyak pelaku konveksi pun beralih ke usaha pakaian bekas impor saat ini. Mereka banyak mengkostum pakaian bekas impor. Di satu sisi, ia heran karena banyak produk lokal yang KW namun tidak ditindak.

Di beberapa negara, pakaian bekas banyak yang didaur ulang dan tidak menjadi sampah. Selain itu banyak konsumen yang tidak semua mampu dan berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Dengan ada barang ini yang mau gaya bisa, tidak perlu mahal. Sedangkan orang Indonesia ingin murah tapi bagus (kualitas)," katanya. ● pra

## Pemkot Bandung Bertekad Hadirkan Opini WTP Kelima Beruntun

**BANDUNG (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat ini, Pemkot Bandung sedang menjalani pemeriksaan terinci dari BPK terkait laporan keuangan 2022. Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Bandung, Ema Sumarna mengatakan, opini WTP empat kali beruntun merupakan capaian positif dan bisa menjadi modal kuat bagi Pemkot Bandung dalam menghadapi pemeriksaan terinci BPK.

"Pemerintah Kota akan selalu berupaya merespon menindaklanjuti terhadap hal yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK," kata Ema Sumarna, Senin (20/3).

Ema Sumarna menyebut, predikat WTP kelima menjadi keniscayaan bagi Pemkot Bandung, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Ema juga meminta seluruh OPD bahu membahu menghadirkan predikat WTP kelima beruntun di Kota Bandung.

"Kami telah menindak-

lanjuti semaksimal mungkin baik penuntasan rekomendasi tahun 2021, atau catatan interim untuk anggaran 2022. Mudah mudahan bisa memenuhi standar pemeriksaan BPK," ucapnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Ayu Rizki mengatakan, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 35 hari kerja mulai 20 Maret sampai 29 April 2023.

Ayu Rizki menilai, Pemkot Bandung telah merespon dengan sangat baik berbagai rekomendasi yang diberikan BPK saat pemeriksaan interim.

"Alhamdulillah respon sangat baik. Semoga semakin baik," kata Ayu Rizki.

Ayu mengatakan, pemeriksaan tidak hanya terkait opini tapi harus ada korelasi antara opini dan kesejahteraan masyarakat dan itu mempengaruhi opini.

Nantinya, tujuan pemeriksaan terinci yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). ● pra

# 8 | Nusantara



### UJI COBA BECAK KAYUH BERTENAGA ALTERNATIF

Gubernur DIY Sri Sultan HB X (kanan) mencoba purwarupa becak bertenaga alternatif di Kantor Kependidikan, Yogyakarta, Senin (20/3). Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar uji coba moda transportasi listrik berupa becak kayu bertenaga penguat sebagai implementasi Perda DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong.

## Komisi IV DPRD Bogor Minta RS Berikan Pelayanan Maksimal Bagi Masyarakat

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Soemaddikarya, RS di Kota Bogor terindikasi banyak berbohong di mana ruangan rawat inap penuh, tetapi ketika anggota DPRD dan Ormas koordinasi, ruang rawat inap mendadak ada. "Nah, hal ini tidak boleh terjadi jika kesehatan masyarakat," terangnya.

**BOGOR (IM)** - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Soemaddikarya menyampaikan pesan kepada seluruh Rumah Sakit (RS) se-Kota Bogor agar mengutamakan tindakan medis dalam penyelamatan pasien dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

Hal ini dimaksudkan Atty Soemaddikarya agar masyarakat Kota Bogor bisa mendapatkan pelayanan maksimal di semua RS wilayah Kota Bogor.

"Pertama sesuai Perda pendirian RSUD Kota Bogor sebagai RS rujukan, di mana pasien membutuhkan ruangan harusnya diupayakan maksimal. Karena anggaran yang dikawal dari APBD untuk membangun RSUD harus bisa melayani masyarakat dan pelayanan Tenaga Kesehatan

(Nakes) harus ramah. Banyak keluhan masyarakat yang masuk atas berbelitnya birokrasi khususnya dalam hal administrasi," ungkap Atty kepada wartawan pada Senin (20/3).

Atty melanjutkan, utamakan tindakan medis dalam menyelamatkan nyawa pasien. Terbaru masuk informasi adanya indikasi konspirasi dan modus RS di Kota Bogor membuat pasien panik hebat, dengan pemberian informasi pasien membutuhkan ruang ICU agar pasien keluar dari ruang IGD.

"Hal seperti ini harusnya tidak terjadi karena pasien bukan benda mati yang harus dibuat bola pingpong. Dalam rakor komisi IV dengan forum LPM Tanah Sareal, kasus terjadi pada ketua forum. Bahwa RS di Kota Bogor terindikasi banyak

berbohong di mana ruangan rawat inap penuh, tetapi ketika anggota DPRD dan Organisasi Masyarakat (Ormas) koordinasi, ruang rawat inap mendadak ada. Nah, hal ini tidak boleh terjadi jika mengacu pada sisi kemanusiaan atas kesehatan masyarakat," terang Atty.

Atty menegaskan, karena itu dirinya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait, khususnya RS yang keberadaannya di Kota Bogor agar bisa kerjasama. Jangan ada kesan pasien dilayani ketika ada komunikasi dan koordinasi dengan anggota DPRD dan Ormas, karena tanpa koordinasi, hak pasien harus diberikan semaksimal mungkin.

"Ya, jangan terkesan jadi ada ruang, setelah dikontak DPRD atau ormas. Karena nyawa masyarakat sangat berharga, tanpa melihat jabatan, suku, agaman dan tingkatan sosial pasien," tegasnya.

Atty menambahkan, bagi pihak RS pelayanan tentang kesehatan adalah satu kewajiban dan lapisan masyarakat punya hak yang sama untuk menerima pelayanan maksimal di RS manapun di wilayah hukum Kota Bogor. Jangan jadikan kata panik menjadi budaya di Kota Bogor.

"Ya, jika hari ini terjadi pada seorang pasien, tidak mustahil akan terjadi pada pasien lain dan keluarga kita

nanti menjadi korban atas arogansi RS yg sering membuat panik. Kebohongan ruang

rawat inap penuh dijadikan senjata, hanya satu kata yaitu lawan!," pungkasnya. ● jay

## Jalan Raya Gununghalu Tertutup Longsor, Arus Lalin Cianjur-Bandung Putus

**CIANJUR (IM)** - Jalan Raya Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, terputus akibat tertutup material longsor. Bencana longsor yang menerjang badan jalan raya itu terjadi setelah wilayah Gununghalu diguyur hujan deras pada Minggu (20/3) malam.

"Seluruh badan jalan arah Bunijaya se lebar 5 meter tertutup total dengan ketebalan material longsor tanah 10 meter," ujar Petugas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Rudi Wibikana, Senin (20/3).

Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas dari arah Cianjur selatan menuju Bandung via Gununghalu ataupun sebaliknya lumpuh. Kendaraan dari kedua arah mau tak mau harus memutar dan mencari jalur alternatif lain untuk bisa melintas. "Kondisi saat ini, jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.

Aktivitas kegiatan warga dari dua Desa Bunijaya dan Cilangari juga arah ke Cianjur terhambat. Karena memang jalan yang tertutup merupakan jalur utama," kata Rudi.

Dari hasil asesmen, hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengakibatkan longsor di beberapa titik. "Longsor tebing di jalan kabupaten ini ada 7 titik, sementara 1 titik longsor menutup total akses jalan. Tinggi tebing di jalan kabupaten lebih 40 meter dan panjang 30 meter," papar Rudi. Saat ini petugas gabungan dari BPBD bersama aparat kewilayah masih berupaya untuk melakukan evakuasi material longsor.

Menurut Rudi, evakuasi material longsor ini musti menggunakan alat berat lantaran ketebalan mencapai 10 meter. "Kami sedang menunggu alat berat beko untuk membuka akses jalur. Evakuasinya memerlukan alat berat," tandasnya. ● pra

## Tarif Naik hingga 20 Persen, Kantor PDAM Kota Tegal Didemo Warga

**TEGAL (IM)** - Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Bahari atau PDAM Kota Tegal, Jawa Tengah diguderud warga yang merasa keberatan atas kenaikan tarif yang mencapai 20 persen sejak Februari 2023, Senin (20/3).

Sebelumnya, warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu menggelar orasi di depan kantor PDAM yang berada di Jalan Pancasila Kota Tegal. Aksi damai itu mendapat pengawalan dari Polres Tegal Kota. Setelah berorasi dengan menggunakan mobil dilengkapi pengeras suara, perwakilan mereka masuk ke dalam kantor dan meminta bertemu Direktur PDAM, Hasan Suhandi. Namun Hasan tidak berada di kantor. Perwakilan warga kemudian ditemui Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Humas, Heri Nurdin dan Setiawan.

Koordinator aksi, Fauzan Jamal meminta ditanggukannya kebijakan kenaikan tarif yang memberatkan pelanggan.

"Karena kebijakan itu belum final. Karena hanya mendasari SK Wali Kota No. 539/013/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang belum ada konsideran hierarki hukumnya," kata Fauzan, Senin.

Menurut Fauzan, sebelum diterbitkan SK Wali Kota harus ada kajian tentang Permenagri No. 21 Tahun 2020 oleh bagian Hukum Pemkot dengan PDAM yang kemudian diusulkan ke Kemenkumham. Setelah ada surat persetujuan dari Kemenkumham baru diterbitkan SK. Wali Kota.

"Bagi pelanggan yang sudah membayar tarif naik, terhutang Februari 2023, mohon

dikembalikan sisa pembayarannya karena kebijakan tersebut cacat hukum," kata Fauzan.

Menurut Fauzan, kebijakan itu sepihak karena belum ada sosialisasi kepada para pelanggan. Apalagi kebijakan itu tidak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan para pelanggan.

"Seperti dengan Permenagri No 21 Tahun 2020, pada pasal 7A kenaikan tarif itu tidak boleh melampaui 4 persen UMK (upah minimum kota)," sebut Fauzan.

Tak hanya itu, menurut Fauzan belum lagi tingkat kebocoran air yang terjadi adalah karena ketidakprofesionalan pengelolaan dan lemahnya pengawasan.

"Maka tidak seharusnya itu dibebankan kepada para pelanggan dengan menaikkan tarif yang tidak wajar," kata Fauzan.

Fauzan juga menyoroiti terkait perekrutan direksi PDAM yang seharusnya lebih transparan dan adil. "Jangan sampai ada permainan kotor dari orang dalam PDAM sendiri," kata Fauzan.

Scharusnya, kata Fauzan perekrutan direksi bisa lebih dipromosikan kualitas serta profesionalitas bukan karena faktor kedekatan dengan penguasa. "Karena apabila ada transaksi di dalamnya itu akan fatal akibatnya untuk masa depan PDAM itu sendiri," pungkasnya.

Sementara Kasubbag Perencanaan PDAM, Heri Nurdin mengaku menampung aspirasi warga dan akan meneruskan ke direktur. "Adapun terkait kebijakan itu ada di kewenangan pimpinan. Nanti akan kita sampaikan," kata Heri. ● pra

## Musrebang, Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

**BOGOR (IM)** - Dalam rangka menyamakan arah kebijakan pembangunan tahun 2024, memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan program visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada tahun 2024 ke depan.

Disampaikan Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama DPRD Kabupaten Bogor dan Bependalitbang Provinsi Jawa Barat, Kepala Bapendalitbang Kabupaten Bogor.

Pada gelaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang), di Gedung Tegar Beriman, Pemkab Bogor, Senin (20/3).

Musrebang dihadiri DPRD Kabupaten Bogor, Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat (LSM) se-

Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut ditegaskan Iwan, hal itu dilakukan untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan tahun 2024, dengan RPJMD atau program tertuang dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor telah ditetapkan.

Iwan Setiawan menyebutkan, arah kebijakan pembangunan tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD, karena RPJMD adalah kebijakan atau visi misi yang harus diimplementasikan.

Sesuai dengan dijalankan dan dikerjakan oleh para Kepala Perangkat Daerah, diantaranya yaitu, pertama, menyelesaikan target Program Pancakarsa. Kedua, menangani permasalahan kesehatan lainnya.

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menangani kemiskinan

dan pengangguran. Keempat, menata penyederhanaan birokrasi.

"Melalui ini akan evaluasi dan bahas bersama berapa persen usulan-usulan masyarakat dari bawah ke atas itu ditampung atau diterima, untuk dijadikan program oleh perangkat daerah, dan berapa persen usulan masyarakat dari tingkat desa itu dilaksanakan oleh kita," tegas Iwan Setiawan.

Selain itu Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh undangan hadir pada acara Musrebang RPKD Kabupaten Bogor, untuk perencanaan tahun 2024.

"Momentum inilah sebagai arah kebijakan Pemkab Bogor pada arah kebijakan program RPKD ke depan, " tukasnya. ● gio

